



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR: 06A/KEP/WASDAL/II/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1.7/KEP/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 04/KEP/WASDAL/II/2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 06/KEP/WASDAL/II/2023 Tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024; dan  
2. Peta Strategi dan Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.

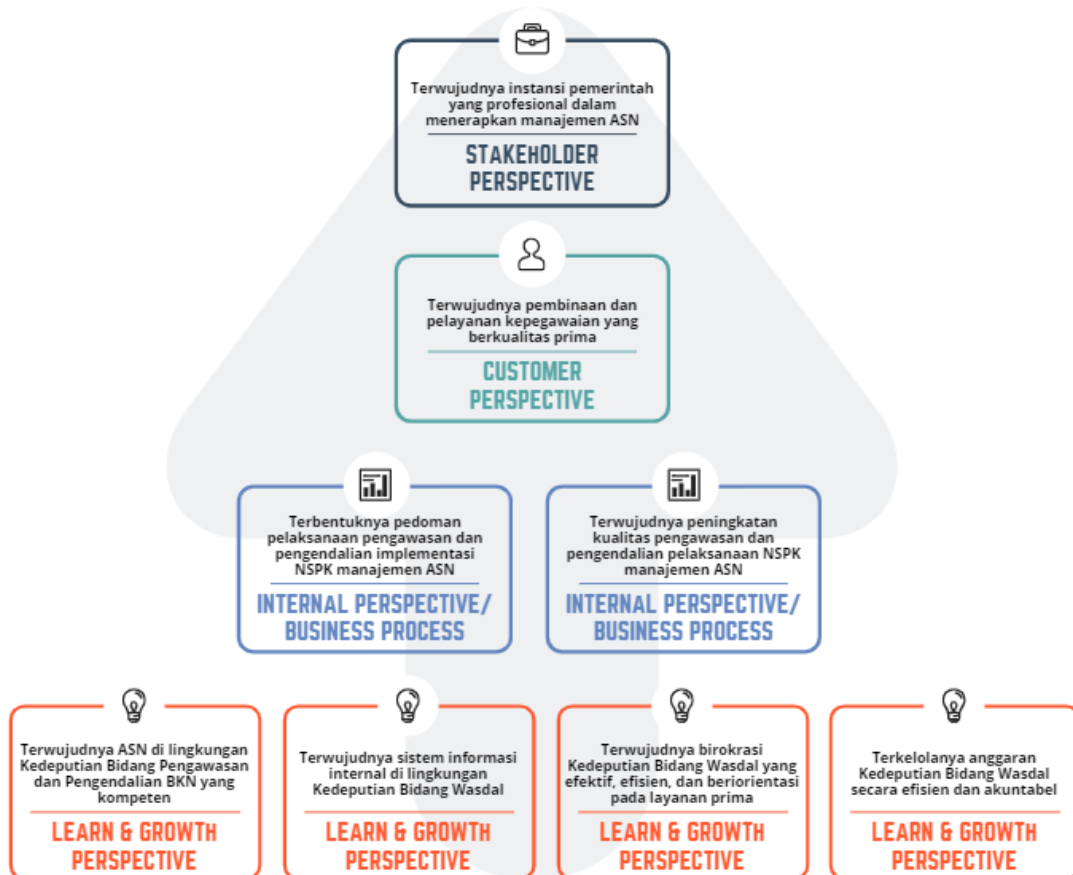
KETIGA : Masing-masing pimpinan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara wajib:  
1. Menetapkan Perencanaan Strategis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang diimplementasikan secara komprehensif pada semua level unit organisasi.  
2. Menetapkan Peta Strategis dan IKU di lingkungan unit organisasi masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKU, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi BKN;  
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKU di lingkungan unit organisasi masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 1 Februari 2023

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

**PETA STRATEGI**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**TAHUN 2023**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1.	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal A dan B)
2.	Indeks kepuasan masyarakat
3.	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN
4.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti
5.	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/ pemberhentian/ pemindahan/mutasi/promosi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu
6.	Jumlah rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN
7.	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN
8.	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar
9.	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
10.	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
11.	Persentase realisasi anggaran
12.	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 1. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B)**

Perspektif	<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN
Indikator Kinerja Utama	Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai SPK (minimal bernilai A dan B)
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Suatu ukuran yang menggambarkan instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK. Ukuran ini dihitung dengan menggunakan penilaian yang disebut Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (yang bernilai A dan B). Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN serta Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan salah satu metode pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;</li> <li>b. pengadaan ASN;</li> <li>c. pengangkatan ASN;</li> <li>d. pangkat;</li> <li>e. mutasi;</li> <li>f. jabatan;</li> <li>g. pengembangan karier ASN;</li> <li>h. pola karier;</li> <li>i. penggajian, tunjangan, dan fasilitas;</li> <li>j. penghargaan;</li> <li>k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;</li> <li>l. perlindungan;</li> <li>m. penilaian kinerja;</li> <li>n. cuti;</li> <li>o. kode etik;</li> <li>p. disiplin;</li> <li>q. pemberhentian; dan</li> <li>r. pensiun.</li> </ul> Kategori penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN ada 5, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul;</li> <li>b. nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik;</li> <li>c. nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup;</li> <li>d. nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan</li> <li>e. nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.</li> </ul>
	<b>Formula</b>
	$IKU = \frac{\text{Jumlah instansi yang mendapatkan nilai A dan B pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN}}{\text{Jumlah instansi pemerintah}} \times 100\%$

	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai instrumen untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.</li> <li>2. Sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan instansi masing-masing.</li> <li>3. Sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	( ) Outcome (X) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 2. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Perspektif	<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepuasan Masyarakat
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
	<b>Formula</b>
	Perhitungan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Kategori nilai Indeks Kepuasan Masyarakat: A = 88,31 - 100 (Sangat Baik) B = 76,61 - 88,30 (Baik) C = 65,00 – 76,60 (Kurang Baik) D = 25,00 – 64,99 (Tidak Baik)
	<b>Tujuan</b>
	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKN dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian implementasi manajemen ASN oleh BKN
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X) Semesteran ( ) Tahunan



**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 3. Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN**

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh BKN sebagai salah satu cara menciptakan manajemen ASN yang profesional. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Indikator Kinerja Utama	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Suatu ukuran perbandingan antara jumlah permasalahan kepegawaian ASN yang diselesaikan dengan jumlah pengaduan permasalahan kepegawaian ASN yang diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
	<b>Formula</b>
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian ASN}}{\text{Jumlah Permasalahan Kepegawaian ASN}} \times 100\%$
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Tujuan</b>
	Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi pemerintah sesuai dengan NSPK manajemen ASN
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	DeWasdal Digital Workplace
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti**

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh BKN sebagai salah satu cara menciptakan manajemen ASN yang profesional. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Indikator Kinerja Utama	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Ukuran yang menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada aspek: 1. Pengangkatan ASN a. Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada instansi yang mengalami kekosongan PPK 2. Mutasi a. Mutasi PNS pada instansi yang mengalami kekosongan PPK 3. Promosi a. Promosi PNS pada instansi yang mengalami kekosongan PPK 4. Penggajian dan tunjangan a. Kenaikan Gaji Berkala b. Permasalahan ASN Non Aktif yang Diduga Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah 5. Disiplin a. Netralitas ASN 6. Pemberhentian a. Tipikor ASN b. Pemberhentian ASN bagi instansi yang mengalami kekosongan PPK Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.
	<b>Formula</b>
	<i>IKU</i> <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditindaklanjuti oleh</i> = $\frac{\text{Instansi Pemerintah}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian}}$
	<b>Tujuan</b>
	1. Memastikan kebijakan dan implementasi manajemen ASN pada instansi pemerintah sesuai dengan NSPK manajemen ASN khususnya berkaitan dengan pengangkatan, mutase, promosi, penggajian dan tunjangan, disiplin, serta pemberhentian ASN. 2. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN yang terintegrasi.
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	( ) Outcome (X) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Jenis Penghitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir <input type="checkbox"/> Rata-rata
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Raw Data <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 5. Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/promosi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu**

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.
Indikator Kinerja Utama	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/promosi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Ukuran yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pertimbangan teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/promosi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah seluruh pertimbangan teknis yang diukur berdasarkan POS AP Pertimbangan Teknis
	<b>Formula</b>
	$IKU = \frac{\text{Jumlah pertimbangan teknis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pertimbangan teknis}} \times 100\%$
	<b>Tujuan</b>
	Untuk menjamin proses pemberian pertimbangan teknis dilaksanakan sesuai prosedur
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output ( ) Kualitas/Mutu (X) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Database rekapitulasi pertimbangan teknis pengangkatan/pemberhentian/pemindahan/mutasi/promosi kepegawaian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 6. Jumlah rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN**

Perspektif	<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan dan pengendalian yang dimaksud disini adalah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilakukan melalui metode represif. Metode represif merupakan metode pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui audit manajemen ASN. Audit manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b> Ukuran yang menggambarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakkan disiplin ASN dalam aspek : 1. ketaatan lapor harta kekayaan; 2. netralitas ASN; 3. ketaatan lapor pajak penghasilan; 4. keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang; dan 5. penyalahgunaan narkoba.
	<b>Formula</b>  1 Rekomendasi Kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakkan disiplin ASN
	<b>Tujuan</b> Untuk memberikan sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkeadilan sesuai dengan data dan fakta yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN
Satuan Pengukuran	Rekomendasi Kebijakan
Jenis Aspek Target	(X) Kuantitas/output ( ) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	( ) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta (X) Non Cascading
Metode Cascading	(X) Adopsi langsung ( ) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
Sumber Data	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 7. Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya ASN di lingkup Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang kompeten
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya ASN kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang kompeten bermakna bahwa ASN Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian diharapkan memiliki kompetensi tinggi, profesional dalam bekerja serta juga memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya
Indikator Kinerja Utama	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkup Kedepuitan Bidang WASDAL BKN
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<p><b>Definisi</b></p> <p>Suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas jabatan. Sesuai dengan definisinya, Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi</li> <li>2. Kompetensi</li> <li>3. Kinerja</li> <li>4. Disiplin</li> </ol> <p>Adapun pengkategorian tingkat profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai 91-100 (sangat tinggi)</li> <li>b. Nilai 81-90 (tinggi)</li> <li>c. Nilai 71-80 (sedang)</li> <li>d. Nilai 61-70 (rendah)</li> <li>e. Nilai 0-60 (sangat rendah)</li> </ol> <p>Pengukuran indeks profesionalitas ASN ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</p>
	<p><b>Formula</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} \cdot R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} \cdot R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} \cdot R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} \cdot R_{4m}</math> </div> </div> <p><b>Keterangan:</b></p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p>IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> = R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p>W<sub>2k</sub> = R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p>W<sub>3l</sub> = R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p>W<sub>4m</sub> = R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator</p>
	<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN.</li> <li>2. Sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.</li> <li>3. Sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik di BKN.</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Indeks
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BKN

Jenis Penghitungan Data	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir <input type="checkbox"/> Rata-rata
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Raw Data <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 8. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Deskripsi Sasaran Strategis	Kondisi pemanfaatan sistem informasi yang diharapkan sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian atas sistem informasi/aplikasi yang telah terstandar di BKN
Indikator Kinerja Utama	Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Ukuran yang menggambarkan tingkat pemanfaatan sistem informasi/aplikasi BKN yang terstandarisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian seperti aplikasi Location Based Presence, eKinerja, Email BKN, dll.
	<b>Formulasi</b>
	$IKU = \frac{\left(\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} \dots + \frac{a_{11}}{b_{11}}\right)}{11} \times 100\%$ <p> <i>a<sub>1</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan LBP</i>  <i>a<sub>2</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan PRESENSI</i>  <i>a<sub>3</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan E – KINERJA</i>  <i>a<sub>4</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan DeWasdal Digital Workplace</i>  <i>a<sub>5</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan DS</i>  <i>a<sub>6</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan email BKN</i>  <i>a<sub>7</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan LOKER</i>  <i>a<sub>8</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan SIONI</i>  <i>a<sub>9</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan SIMONBAJA</i>  <i>a<sub>10</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan SIPD</i>  <i>a<sub>11</sub> = Jumlah Yang Memanfaatkan indeksnspk. bkn. go. id</i>  <i>b<sub>1</sub> = Jumlah Responden LBP</i>  <i>b<sub>2</sub> = Jumlah Responden PRESENSI</i>  <i>b<sub>3</sub> = Jumlah Responden E – KINERJA</i>  <i>b<sub>4</sub> = Jumlah Responden DeWasdal Digital Workplace</i>  <i>b<sub>5</sub> = Jumlah Responden DS</i>  <i>b<sub>6</sub> = Jumlah Responden email BKN</i>  <i>b<sub>7</sub> = Jumlah Responden LOKER</i>  <i>b<sub>8</sub> = Jumlah Responden SIONI</i>  <i>b<sub>9</sub> = Jumlah Responden SIMONBAJA</i>  <i>b<sub>10</sub> = Jumlah Responden SIPD</i>  <i>b<sub>11</sub> = Jumlah Responden indeksnspk. bkn. go. id</i> </p>
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Tujuan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE di BKN</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di BKN</li> </ol>
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Pemanfaatan Sistem Informasi
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan



**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 9. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>												
Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi di lingkup Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima												
Deskripsi Sasaran Strategis	Kondisi yang menggambarkan birokrasi Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.												
Indikator Kinerja Utama	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>												
	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan angka yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian												
	<b>Formula</b>												
	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Evaluasi Mandiri RB unit kerja mencakup:												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>Bobot</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemenuhan</td> <td>14,6</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (2)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (1)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (2)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (1)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (1,4)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (2,5)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (2,2)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Reform</td> <td>21,7</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (3)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (2)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (3,75)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (2)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (3,75)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (1,95)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>36,3</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aspek	Bobot	Sub Komponen	Pemenuhan	14,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (2)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (1)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (2)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (1)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (1,4)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (2,5)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (2,2)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5)</li> </ul>	Reform	21,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (3)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (2)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (3,75)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (2)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (3,75)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (1,95)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)</li> </ul>	<b>TOTAL</b>	<b>36,3</b>	
	Aspek	Bobot	Sub Komponen										
Pemenuhan	14,6	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (2)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (1)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (2)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (1)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (1,4)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (2,5)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (2,2)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5)</li> </ul>											
Reform	21,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Manajemen Perubahan (3)</li> <li>➢ Deregulasi Kebijakan (2)</li> <li>➢ Penataan dan Penguatan Organisasi (1,5)</li> <li>➢ Penataan Tatalaksana (3,75)</li> <li>➢ Penataan Sistem Manajemen SDM (2)</li> <li>➢ Penguatan Akuntabilitas (3,75)</li> <li>➢ Penguatan Pengawasan (1,95)</li> <li>➢ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75)</li> </ul>											
<b>TOTAL</b>	<b>36,3</b>												
<b>Tujuan</b>													
Menciptakan birokrasi BKN yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.													
Satuan Pengukuran	Nilai (Kategori)												
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya												
Kualitas dan Tingkat Kendali	( ) Outcome (X) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah												
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading												
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan												
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV												
Sumber Data	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi												
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata												
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data												
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize												
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan												

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 10. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>																								
Sasaran Strategis	Terwujudnya birokrasi di lingkup Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima																								
Deskripsi Sasaran Strategis	Kondisi yang menggambarkan birokrasi Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang mampu bekerja dengan kelembagaan yang tertata, sistematis dan mampu melakukan efisiensi terutama pada aspek penganggaran. Pada akhirnya, kelembagaan yang berkualitas tersebut memacu peningkatan pelayanan.																								
Indikator Kinerja Utama	Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja																								
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<p><b>Definisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</li> <li>• Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</li> <li>• SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN.</li> <li>• Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKN menggambarkan penilaian atas implementasi SAKIP di BKN yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>																								
	<p><b>Formula</b></p> <p>Kategori penilaian evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI ANGKA</th> <th>INTERPRETASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>&gt;90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>&gt;80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>&gt;70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>&gt;60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>&gt;50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>&gt;30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>&gt;0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	>0-30	Sangat Kurang
	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI																						
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																							
A	>80-90	Memuaskan																							
BB	>70-80	Sangat Baik																							
B	>60-70	Baik																							
CC	>50-60	Cukup																							
C	>30-50	Kurang																							
D	>0-30	Sangat Kurang																							
<p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Deputi Bidang Wasdal BKN</li> <li>2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Deputi Bidang Wasdal BKN</li> <li>3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Wasdal BKN</li> <li>4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Deputi Bidang Wasdal BKN</li> <li>5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya</li> </ol>																									
Satuan Pengukuran	Nilai																								
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya																								
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah																								
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading																								
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan																								
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV																								
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedepuitan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian																								
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata																								

Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Penghitungan Raw Data <input type="checkbox"/> Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 11. Persentase realisasi anggaran**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran di lingkup Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efektif dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Utama	Persentase realiasi anggaran
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Ukuran perbandingan antara jumlah anggaran yang direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
	<b>Formula</b>
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Anggaran Terealisasi}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \times 100\%$
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Tujuan</b>
	Untuk mengukur kinerja belanja negara di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	( ) Outcome (X) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung ( ) Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	sakti.kemenkeu.go.id
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan

**MANUAL IKU**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**IKU 12. Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat**

Perspektif	<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>
Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran di lingkup Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efektif dan akuntabel
Deskripsi Sasaran Strategis	Terkelolanya anggaran secara efisien dan akuntabel bermakna pengelolaan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan prinsip-prinsip penganggaran yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Indikator Kinerja Utama	Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja utama	<b>Definisi</b>
	Persentase yang menggambarkan perbandingan antara tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit oleh BPK/Inspektorat terhadap penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan rekomendasi hasil temuan audit
	<b>Formula</b>
	$IKU = \frac{\text{Jumlah Tindaklanjut Temuan Audit atau Pemeriksaan}}{\text{Jumlah Temuan Audit atau Pemeriksaan}} \times 100\%$
	Cat: Jika tidak terdapat temuan BPK atau Inspektorat maka kinerja tercapai 100%
	<b>Tujuan</b>
	Mengukur kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh BKN dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Satuan Pengukuran	Persentase
Jenis Aspek Target	( ) Kuantitas/output (X) Kualitas/Mutu ( ) Waktu ( ) Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(X) Outcome ( ) Outcome Antara ( ) Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non Cascading
Metode Cascading	( ) Adopsi langsung (X) Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( ) Tidak diturunkan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV
Sumber Data	Laporan Hasil Audit BPK/Inspektorat
Jenis Penghitungan Data	(X) Nilai Posisi Akhir ( ) Rata-rata
Status Data	(X) Hasil Penghitungan Raw Data ( ) Raw Data
Polarisasi Indikator Kinerja	(X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan	( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan